

BAB II
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM EKONOMI KREATIF
DI INDONESIA

2.1 Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi dalam SDGs

Partisipasi memiliki peran yang penting bagi pembangunan. Dengan partisipasi, pembangunan akan berjalan lancar. Namun, tanpa partisipasi, pembangunan akan terhambat. Samuel Paul menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Pertama, partisipasi menghemat biaya proyek karena partisipan turut menyumbangkan dana atau tenaga mereka selama proyek pembangunan berlangsung. Kedua, partisipasi meningkatkan efisiensi proyek dimana partisipan membantu mengidentifikasi dan menentukan sasaran yang akan menerima manfaat dari pembangunan.

Ketiga, partisipasi meningkatkan efektivitas proyek karena penerima manfaat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan manfaat pembangunan diterima tepat pada sasaran. Keempat, partisipasi meningkatkan kapasitas penerima manfaat dengan memastikan bahwa penerima manfaat secara aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Terakhir, partisipasi meningkatkan pemberdayaan karena partisipasi memberikan kontrol terhadap akses sumber daya dan pengambilan keputusan (Bamberger, 1986).

Dari alasan-alasan yang telah disebutkan, maka SDGs akan sukses ketika masyarakat berpartisipasi dalam prosesnya, baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan. Pada proses perencanaan, masyarakat akan membantu untuk

mengidentifikasi isu-isu dan siapa saja yang harus diprioritaskan dalam proyek pembangunan berdasarkan kondisi lapangan yang meliputi lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi (Claridge, 2004). Sedangkan pada proses pelaksanaan, masyarakat mendukung pengimplementasian proyek dengan penuh melalui sumbangan, baik berupa dana maupun tenaga secara sukarela. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap kesuksesan SDGs dengan membantu merencanakan proyek SDGs agar tepat pada sasaran dan juga membantu memastikan bahwa manfaat pembangunan terdistribusi secara adil dan merata.

Sebagai bagian dari masyarakat, dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan juga penting bagi keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Namun pada kenyataannya, partisipasi perempuan ini tidak cukup mendapat perhatian sehingga perempuan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan kecuali terdapat proyek yang sengaja dibuat untuk kebutuhan perempuan. Munculnya isu gender dalam pembangunan merupakan titik terang bagi partisipasi perempuan karena disaat inilah partisipasi perempuan mulai mendapat perhatian. Menurut Moser, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan (Bamberger, 1986).

Melalui perhatian ini, ditemukan bahwa partisipasi perempuan dapat menunjang kesuksesan pembangunan. Pertama, partisipasi perempuan membantu mewujudkan kesetaraan gender. Dalam upayanya, kesetaraan gender dihadapkan dengan masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Jika dibiarkan, pembangunan dan pengambilan keputusan akan terhambat (Revenga & Shetty,

2012). Partisipasi perempuan hadir sebagai solusi untuk kesenjangan gender. Ketika partisipasi perempuan ditingkatkan secara maksimal hingga membuat perempuan berada diposisi yang sama dan setara, disaat inilah kesenjangan menghilang dan kesetaraan gender dapat diwujudkan. Mempertimbangkan hal ini, partisipasi perempuan kemudian dijadikan sebagai salah satu target dari SDGs No.5 mengenai Kesetaraan Gender yang berbunyi:

“Target 5.5 : Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life” (United Nations, 2021)

Sebagai salah satu negara yang turut mengadopsi SDGs melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan target 5.5 mengenai partisipasi perempuan. Untuk mempermudah pelaksanaan SDGs dan mewujudkan target yang ada, langkah awal yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah membagi ke-17 tujuan SDGs menjadi empat pilar pembangunan yang meliputi ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dan tata kelola (Kemenpppa, 2020b). Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga menyusun dan menetapkan sasaran nasional dari masing-masing tujuan yang ada didalam SDGs. Adapun sasaran nasional SDGs No.5 Kesetaraan Gender yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Sasaran Nasional SDGs No.5 Kesetaraan Gender

Sasaran Global	Sasaran Nasional
1. Mengakhiri seluruh bentuk diskriminasi	1.1 Meningkatkan kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan
2. Menghapus seluruh bentuk kekerasan	2.1 Menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan 2.2 Meningkatkan layanan yang komprehensif terkait kasus kekerasan terhadap perempuan
3. Menghapus seluruh praktik berbahaya	3.1 Meningkatkan nilai tengah dari usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun 3.2 Menurunkan <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR)</i> menjadi 38 tahun 3.3 Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat
4. Memastikan partisipasi perempuan secara penuh, efektif, dan setara dalam pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi dan masyarakat	4.1 Meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR 4.2 Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif sebagai pengambil keputusan
5. Memastikan akses universal terhadap kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, dan hak reproduksi yang sesuai dengan	5.1 Menurunkan <i>unmet need</i> kebutuhan ber-KB 5.2 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 4 jenis

<i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i>	metode kontrasepsi modern kepada Pasangan Usia Subur 5.3 Menyediakan regulasi yang memastikan bahwa perempuan mendapat pelayanan, informasi, dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
---	---

Sumber : Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Target 5.5 SDGs dan tabel 2.1 memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan tidak hanya diupayakan di bidang politik dan publik, tetapi juga di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan partisipasi perempuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika kesetaraan gender tercapai, disaat itu pula peluang baru atas ekonomi akan terbuka bagi partisipasi perempuan. Semakin tinggi partisipasi perempuan, semakin besar dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan dari *McKinsey Global Institute*, partisipasi perempuan yang setara dengan laki-laki akan dapat meningkatkan PDB Global sebesar 26% pada tahun 2025 (Lemmon & Vogelstein, 2017).

Pada pelaksanaannya, pencapaian partisipasi perempuan di bidang ekonomi dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya indikator SDGs 5.5.2 yang meliputi proporsi perempuan yang bekerja di posisi manajerial (United Nations, 2021). Merujuk pada *Sustainable Development Report*, partisipasi perempuan dikatakan dapat mewujudkan SDGs No.5 Kesetaraan Gender jika tingkat partisipasi antara perempuan dan laki-laki mencapai angka 100. Namun, Indonesia baru bisa mencapai angka sebesar 65,5 (Sachs et al., 2021). Rendahnya angka capaian

Indonesia ini dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan gender dalam partisipasi perempuan. Berdasarkan laporan *Global Gender Gap Index 2021*, Indonesia berada diperingkat ke-99 dengan nilai rata-rata sebesar 0,647 dalam subindeks partisipasi dan peluang ekonomi. Adapun nilai ini tidak lain didapatkan atas perhitungan terhadap indikator-indikator berikut (Tabel 2.2) (World Economic Forum, 2021).

Tabel 2.2 Nilai Partisipasi dan Peluang Ekonomi Berdasarkan Indikatornya

Indikator	Peringkat	Nilai
Partisipasi angkatan kerja	115	0,665
Kesetaraan upah	59	0,697
Perkiraan Pendapatan	114	0,517
Legislatur, jabatan senior, manajer	92	0,424
Pekerja profesional dan teknis	75	0,996

Sumber : World Economic Forum, 2021

Dalam perhitungannya, *Global Gender Gap Index* memiliki interpretasi dimana semakin dekat nilai capaian dengan angka 1, maka semakin kecil kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki. Dengan nilai capaian yang dimilikinya, terlihat jelas bahwa nilai Indonesia (0,647) masih jauh dari angka 1. Meski demikian, nilai yang telah dicapai oleh Indonesia tersebut telah berhasil melebihi nilai rata-rata global sebesar 0,583 yang mana hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan respon positif dalam mengatasi kesenjangan gender (World Economic Forum, 2021).

2.2 Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 270.203.917 juta jiwa dengan 136.661.899 penduduk laki-laki dan 133.542.018 penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik, 2020). Dari jumlah tersebut, terlihat bahwa penduduk laki-laki dan penduduk perempuan memiliki selisih jumlah yang sedikit. Dengan selisih yang sedikit seharusnya perempuan memiliki tingkat partisipasi yang hampir sama dengan laki-laki. Namun, Badan Pusat Statistik menepis anggapan tersebut dengan menunjukkan data mengenai kesenjangan antara perempuan dan laki-laki pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berikut.

**Tabel 2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015-2019**

Jenis Kelamin	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Laki-laki	82,71	81,97	82,51	82,69	83,13
Perempuan	48,87	50,77	50,89	51,88	51,89

Sumber: Kemenpppa, 2020

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa TPAK perempuan dan TPAK laki-laki memiliki perbedaan yang cukup jauh dan angkatan kerja masih di dominasi oleh laki-laki. Rendahnya angka TPAK perempuan disebabkan oleh beberapa faktor seperti budaya, tingkat pendidikan, dan kesempatan kerja (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021). Untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan, pemerintah kemudian melakukan serangkaian upaya yang meliputi ratifikasi CEDAW untuk melindungi hak

perempuan, menetapkan Pengarustamaan Gender (PUG) sebagai strategi nasional, mengadakan pelatihan ekonomi, menciptakan peluang kerja; dan lainnya (Kania, 2016). Perkembangan partisipasi perempuan dapat dilihat melalui indikator penilaian yang ada di dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di bawah ini (Kemenpppa, 2020b).

Tabel 2.4 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) beserta Indikatornya Tahun 2015-2019

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Penilaian					
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,83	71,39	71,74	72,10	75,24
Indikator					
Keterlibatan Perempuan di Parlemen	17,32	17,32	17,32	17,32	20,52
Sumbangan Pendapatan Perempuan	36,03	36,42	36,62	36,70	37,10
Tenaga Profesional Perempuan	46,03	47,59	46,31	47,02	47,76

Sumber : Kemenpppa, 2020

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa IDG perempuan secara perlahan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Bahkan, pencapaian IDG tahun 2019 (75,24) berhasil melebihi target IDG yang telah ditetapkan sebesar 73,24 (Kemenpppa, 2020a). Sedangkan untuk angka capaian dari tiap indikatornya memperlihatkan bahwa pemerintah masih harus bekerja keras dan melakukan upaya lanjutan untuk memaksimalkan partisipasi perempuan Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Agar partisipasi perempuan di bidang ekonomi kian meningkat, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menciptakan peluangnya karena tanpa peluang, maka tidak akan ada yang namanya partisipasi. Penciptaan peluang kerja yang dilakukan Pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Dipilihnya ekonomi kreatif karena sektor ini menekankan pada sumber daya manusia yang sifatnya tak terbatas seperti kreativitas, teknologi dan juga budaya. Belum lagi dengan 17 subsektor yang dimilikinya, tentunya ekonomi kreatif akan memberikan banyak peluang bagi Indonesia, baik peluang untuk partisipasi perempuan maupun perekonomian (Kemenparekraf, 2020b).

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan peluang tersebut adalah dengan menjadikan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional dengan mengesahkan peraturan yang bertujuan untuk mengatur segala hal terkait ekonomi kreatif, yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, 2019). Dalam pelaksanaannya, ekonomi kreatif akan dijalankan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang kemudian berubah nama menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2019 (Kemenparekraf, 2021).

Dalam tindak lanjutnya, Pemerintah Indonesia kemudian menjadikan UMKM sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pelaku ekonomi kreatif. Adapun keputusan ini berdasarkan pertimbangan bahwa UMKM adalah satu pilar penting bagi perekonomian Indonesia melalui kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 60,51% dan juga tingginya daya serap tenaga kerja

sebesar 96,62% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Melalui webinar *entrepreneurship*, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyatakan bahwa dari total UMKM yang berjumlah 65 juta UMKM, sekitar 64% di antaranya dijalankan oleh perempuan (Kemenparekraf, 2022). Dominasi perempuan ini semakin meyakinkan Pemerintah Indonesia bahwa UMKM merupakan sarana yang tepat untuk partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif.

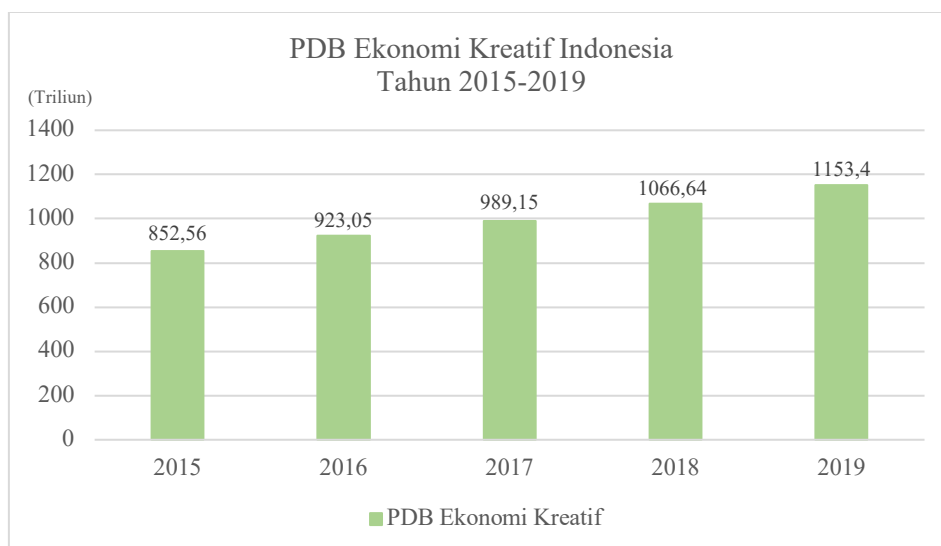
Terdapat beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif melalui UMKM. Pertama, meningkatkan kapasitas dan kualitas perempuan pelaku ekonomi kreatif dengan menyediakan infrastruktur bagi pelaku usaha, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pelatihan pemasaran produk, pelatihan digital, dan membantu pelaku usaha dalam mendapatkan hak kekayaan intelektual (Kemenparekraf, 2020a).

Kedua, Memfasilitasi akses pembiayaan modal. Keterbatasan modal adalah salah satu faktor yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi kreatif. Oleh karenanya, pemerintah disini menyediakan bantuan modal untuk mengatasi masalah modal dan memudahkan perempuan untuk mendirikan usaha mereka. Beberapa akses pembiayaan modal yang disediakan Kemenparekraf, yaitu Bantuan Intensif Pemerintah, Temu Bisnis Perbankan Konvensional dan Syariah, Pembuatan Dashboard Akses Pembiayaan, KreatIPO, Asian Animation Summit (AAS), dan lainnya. Ketiga, menjalin kerjasama dengan perusahaan mitra untuk mendorong digitalisasi UMKM yang mana digitalisasi ini akan memudahkan perempuan untuk bekerja dari rumah dan memperluas pasar. Adapun perusahaan-

perusahaan yang menjadi mitra, yaitu Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lainnya (Kemenparekraf, 2020a).

Sebagai pelaku ekonomi kreatif, perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dan setara. Isu perempuan dan ekonomi kreatif sebenarnya adalah isu yang lintas sektor sehingga dibutuhkan sinergi antar lembaga pemerintah. Untuk itu, Kemenparekraf menandatangani nota kesepemahaman tentang pengarusutamaan gender bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) untuk melindungi hak perempuan sekaligus memperjuangkan kesetaraan gender dalam ekonomi kreatif (Kemenpppa, 2016). Tidak hanya itu, Kemenpppa disini juga turut mendukung partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif melalui sosialisasi, edukasi, penyelenggaraan bazaar, pelatihan kewirausahaan, dan turut serta dalam G20 Empower (Kemenpppa, 2021).

Gambar 2.1 PDB Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019



Sumber : Kemenparekraf, 2020

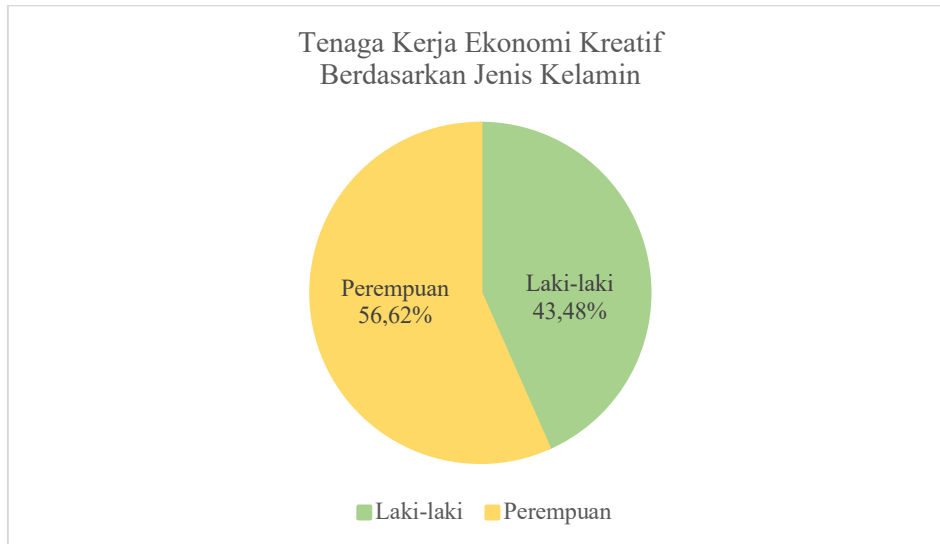
Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia memberikan dampak positif terhadap PDB ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, pemerintah juga berhasil meningkatkan angka tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif secara positif, khususnya tenaga kerja perempuan (Gambar 2.2) (Kemenparekraf, 2020a). Untuk angka tenaga kerja sendiri, tentunya merupakan perhitungan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, angka partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja mengalami peningkatan yang sebelumnya 41,69% pada tahun 2016 menjadi 56,62% pada tahun 2019. Tingginya daya serap ekonomi kreatif ini kemudian menjadikan perempuan sebagai pemeran utama dalam ekonomi kreatif (Gambar 2.3) (Kemenparekraf, 2020b).

Gambar 2.2 Tenaga Kerja Ekonomi kreatif Tahun 2015-2019



Sumber : Kemenparekraf, 2020

Gambar 2.3 Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Kemenparekraf, 2020

Angka partisipasi perempuan dalam ekonomi pada gambar 2.3 sangat berbanding terbalik dengan partisipasi perempuan secara umum yang angka partisipasinya hanya sebesar 37,16% dan angka partisipasi laki-lakinya sebesar 62,84%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingginya angka partisipasi angkatan kerja perempuan hanya terjadi di sektor ekonomi kreatif, sedangkan untuk secara umum tingkat angkatan kerja masih didominasi oleh laki-laki (Sirclo, 2020). Terdapat dua alasan yang menyebabkan perempuan mendominasi sektor ekonomi kreatif. Pertama, perempuan berpartisipasi dalam ekonomi kreatif karena mereka ingin membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kedua, perempuan berpartisipasi dalam ekonomi kreatif karena mereka melihat adanya ketersediaan peluang untuk menjalankan sebuah usaha (Rahmadani, wawancara, 2022).

Meski pengembangan ekonomi kreatif telah berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan dan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia,

nyatanya upaya Pemerintah Indonesia tidak serta merta berhenti sampai di situ. Sadar akan pentingnya peran perempuan bagi pembangunan, justru memacu Pemerintah Indonesia agar lebih memaksimalkan partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah dan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Hal ini karena perempuan dalam ekonomi kreatif masih dihadapkan dengan berbagai kerentanan.

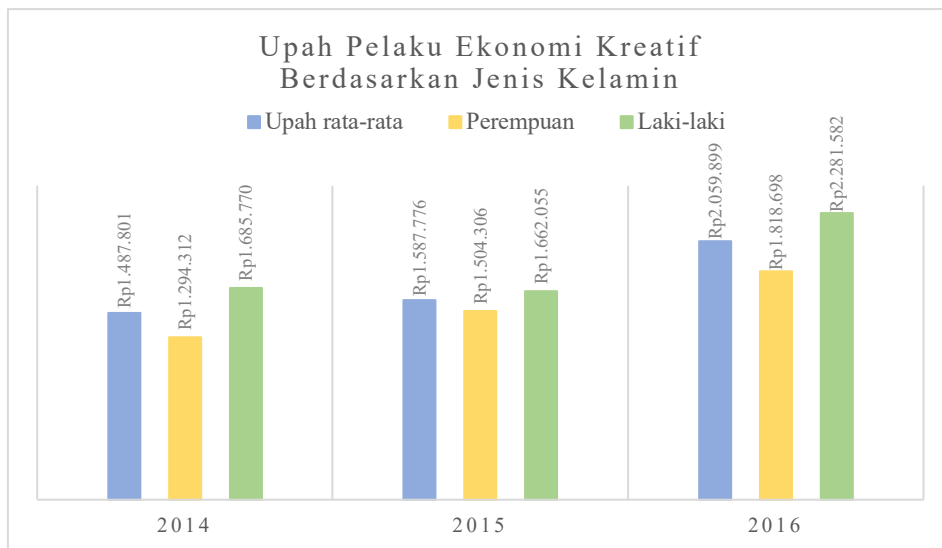
Menurut UN Women, agar partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif dapat ditingkatkan dengan maksimal, maka partisipasi harus disertai pula dengan pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan tujuh poin dalam *Women's Empowerment Principles* (WEPs). Pemberdayaan perempuan sangat penting bagi partisipasi karena perempuan akan dapat hidup dalam versi terbaik diri mereka dan juga dengan potensi diri yang maksimal melalui pemberdayaan.

2.3 Kerentanan Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Ekonomi Kreatif

Dalam pelaksanaannya, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif masih belum optimal dan diperlukan banyak upaya. Tidak lain karena perempuan dihadapkan pada sejumlah kerentanan sehingga mereka tidak memiliki kebebasan untuk berpartisipasi sesuai dengan keinginan mereka. Kerentanan pertama yang dihadapi oleh perempuan dalam ekonomi kreatif adalah terbatasnya akses untuk meningkatkan kapasitas diri. Bagi ekonomi kreatif yang menekankan pada sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas diri adalah hal yang penting. Maka dari itu, jika perempuan ingin berpartisipasi dalam ekonomi kreatif, mereka harus mengasah dan memaksimalkan kemampuan atau keahlian

yang mereka miliki. Namun, hal ini sulit untuk dilakukan karena perempuan memiliki akses yang terbatas untuk meningkatkan kapasitas diri mereka sehingga hal ini juga menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi kreatif. Akibat dari terbatasnya akses ini perempuan yang berpartisipasi dalam ekonomi kreatif akan terhambat karena mereka tidak memiliki kapasitas diri yang ekonomi kreatif butuhkan.

Gambar 2.4 Upah Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Kedua, kesenjangan upah dimana upah perempuan lebih rendah dibandingkan upah laki-laki. Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa upah laki-laki dalam ekonomi kreatif selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan di setiap tahunnya. Seakan dibayar lebih rendah dari laki-laki belum cukup, Koalisi Seni menemukan bahwa 41% pekerja perempuan dibayar di bawah upah minimum (The Finery Report, 2021). Hal ini diperkuat dengan data dari laporan Bekraf yang menunjukkan bahwa upah yang didapat perempuan memang lebih rendah dari rata-

rata upah di sektor ekonomi kreatif (Gambar 2.4). Adapun kesenjangan upah ini disebabkan oleh beberapa hal seperti pekerjaan laki-laki lebih berisiko dari perempuan, laki-laki dianggap lebih produktif dari perempuan, dan kapasitas diri laki-laki yang lebih baik dari perempuan (Badan Ekonomi Kreatif & Badan Pusat Statistik, 2017b).

Ketiga, terbatasnya akses digital untuk perempuan. Dewasa ini, dengan segala kemudahan dan peluang yang ditawarkannya, tidak ada yang dapat menolak untuk menggunakan perangkat digital, termasuk ekonomi kreatif. Bagi ekonomi kreatif, perangkat digital akan membantu pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar mereka. Sayangnya, tidak semua perempuan pelaku ekonomi kreatif dapat merasakan manfaat dari digital ini karena 52% perempuan masih belum dapat mengakses jaringan internet (Suwana & Lily, 2017). Di samping itu, rendahnya literasi digital turut menjadi alasan terbatasnya akses digital untuk perempuan. Dalam hal ini, literasi digital yang rendah membuat perempuan dalam ekonomi kreatif tidak dapat memaksimalkan perangkat digital untuk usaha atau konten kreatif mereka karena perempuan tidak mengerti cara memasukkan produk kreatif mereka ke *e-commerce*, kurang mengerti cara mempromosikan produk kreatif mereka secara digital, dan lainnya.

Terakhir, terbatasnya akses modal untuk perempuan. Baik pada awal mula pendirian maupun saat akan mengembangkan usaha kreatif, yang hal utama yang dibutuhkan adalah modal. Tanpa modal, maka pelaku usaha tidak akan dapat membeli berbagai kebutuhan seperti membeli bahan baku, membeli bahan kemasan, melakukan promosi, dan lainnya. Untuk mengatasi masalah modal, salah

satu solusinya adalah mencari pinjaman modal usaha ke bank. Meski dalam pinjamannya perempuan memiliki tingkat pengembalian yang lebih baik dari laki-laki. Namun, pada proses pengajuannya perempuan cenderung dipersulit oleh pihak bank karena beberapa alasan, yaitu usaha perempuan dianggap lebih berisiko, usaha perempuan dipandang tidak akan lebih sukses dari usaha laki-laki, dan kurangnya pengalaman perempuan dalam menjalankan suatu usaha (Ariany et al., 2013). Dengan kurangnya modal ini lah yang kemudian membuat perempuan yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi kreatif dengan mendirikan usaha harus berpikir ulang kembali.

Dari yang telah disebutkan, dapat dilihat bahwa perempuan yang berpartisipasi dalam ekonomi kreatif masih dihadapkan dengan berbagai kerentanan sehingga partisipasi perempuan di sini belum maksimal. Maka dari itu, diperlukan upaya yang kuat untuk mengatasi kerentanan-kerentanan ini agar partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif dapat berjalan dengan sukses.